

Konsep Kepemimpinan Khalifah dalam Al-Qur'an untuk Masyarakat Multikultural Kontemporer

Retisfa Khairanis^{1*}, Muhammad Aldi²

¹UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

²UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Abstract

Leadership in the Islamic perspective, especially the concept of caliph, has an important relevance in facing the challenges of contemporary multicultural society. The concept of khalifah in the Qur'an emphasizes human responsibility as a just and wise leader on earth. This research aims to analyze how the principles of khalifah leadership can be applied in an ethnically, religiously, and culturally diverse society. The research method used is a literature review with a tafsir approach to the Qur'anic verses related to leadership. The results show that the principles of caliph leadership, such as justice, deliberation, and social responsibility, are very relevant in building harmony in a multicultural society. In conclusion, caliph leadership in the Qur'an can be an important guideline in creating social welfare in a plural society.

Keywords : Leadership; Khalifah; Qur'an; Multicultural Society

Abstrak

Kepemimpinan dalam perspektif Islam khususnya konsep khalifah memiliki relevansi penting dalam menghadapi tantangan masyarakat multikultural kontemporer. Konsep khalifah dalam Al-Qur'an menekankan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana di bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah dapat diterapkan dalam masyarakat yang beragam secara etnis, agama, dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah, seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, sangat relevan dalam membangun harmoni dalam masyarakat multikultural. Kesimpulannya, kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an dapat menjadi pedoman penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat yang plural.

Kata Kunci : Kepemimpinan; Khalifah; Al-Qur'an; Masyarakat Multikultural

Copyright (c) 2025 Retisfa Khairanis^{1*}, Muhammad Aldi²

✉ Corresponding author : Retisfa Khairanis^{1*}

Email Address : retisfakhairanis182001@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepemimpinan adalah salah satu elemen penting dalam struktur sosial manusia. Dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan multikultural, pemahaman dan penerapan konsep kepemimpinan yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai moral sangat diperlukan.¹ Dalam tradisi Islam, konsep kepemimpinan yang dikenal sebagai khalifah memiliki dimensi yang luas, mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan alam. Dalam Al-Qur'an, konsep ini dijelaskan dengan jelas, dan sangat relevan dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan di tengah keragaman budaya dan agama yang ada dalam masyarakat kontemporer.² Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah dalam konteks masyarakat multikultural saat ini.³

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep kepemimpinan khalifah dalam Islam, baik dari perspektif teologis maupun historis. Sebagian besar penelitian ini berfokus pada pemahaman kepemimpinan dari sudut pandang idealitas ajaran Al-Qur'an dan aplikasinya dalam masyarakat Muslim yang homogen.⁴ Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengkaji tentang kepemimpinan dalam ruang lingkup umat Islam, baik itu dalam konteks pemerintahan atau sosial. Misalnya, kajian mengenai sejarah kepemimpinan Khalifah dalam konteks politik Islam klasik, serta pemahaman teologis tentang kewajiban moral pemimpin dalam Islam, banyak ditemukan dalam literatur.

Namun, sebagian besar studi yang ada belum mengkaji secara mendalam bagaimana konsep kepemimpinan khalifah dapat diadaptasi dan diterapkan dalam masyarakat yang pluralistik, dengan berbagai latar belakang agama, budaya, dan etnis.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memfokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural kontemporer. Studi ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena mencoba untuk menelusuri penerapan konsep kepemimpinan ini dalam konteks sosial yang lebih beragam dan mengutamakan pentingnya keadilan sosial dan harmoni antar kelompok dalam masyarakat.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam masyarakat

¹Isnan Ansory and Muhammad Yusuf Siddik, "MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM STUDI ULUM AL-QUR'AN DAN ILMU USHUL FIQIH," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 1–19.

²Muhammad Aldi et al., "Optimizing the Learning Process through Theory-Based Media Selection: Constructivist, Cognitive, Collaborative, and Motivational Perspectives," *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology* 6, no. 1 (2025).

³Muhammad Aldi and Ahmad Barizi, "Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Budaya Alam Minangkabau: Membangun Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pengetahuan," *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)* e-ISSN 2721-9666 6, no. 1 (2025): 212–21.

⁴Dewi Fazira et al., "Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis Yang Berbasis Tauhid Dan Kepemimpinan Khalifah," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2025): 35–50.

⁵Muhammad Aldi and Retisfa Khairanis, "The Synergy of Religion and Malay Culture in Improving the Empowerment of Islamic Communities Towards Achieving SDGS," *PERADA* 7, no. 2 (2024).

Konsep Kepemimpinan Khalifah dalam Al-Qur'an untuk Masyarakat Multikultural Kontemporer yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis? Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kepemimpinan khalifah dapat mendukung terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif? Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi nilai-nilai ini, serta solusi-solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks sosial yang pluralistik.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini akan mengkaji tafsir-tafsir Al-Qur'an yang membahas kepemimpinan, serta literatur-literatur yang membahas konsep khalifah dalam Islam.⁷ Fokus utama adalah pada ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai kepemimpinan seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, pendekatan ini juga akan mencakup kajian terhadap artikel-artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang membahas penerapan konsep kepemimpinan khalifah dalam masyarakat yang beragam.⁸

Dengan menggunakan pendekatan tafsir, penelitian ini berusaha menggali makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan kepemimpinan. Penelitian ini juga akan memperhatikan konteks sosial yang ada saat ini, khususnya dalam masyarakat multikultural. Melalui analisis literatur dan tafsir, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana konsep kepemimpinan khalifah dapat diadaptasi untuk merespon tantangan-tantangan sosial kontemporer, terutama yang berkaitan dengan keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam masyarakat multikultural, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang timbul dari penerapan konsep tersebut dalam konteks sosial yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kepemimpinan khalifah dapat mendukung terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya dan agama.⁹

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis mengenai bagaimana nilai-nilai kepemimpinan khalifah dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik dan praktik sosial guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemimpin, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam yang universal dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

⁶Muhammad Aldi and Akhmad Nurul Kawakib, "Reconstruction of Islamic Education Philosophy in Minangkabau Customary Values: Actualizing the Principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2025): 1548–57.

⁷"بابور الإسلامية التربوية معهد في القراءة وفهم المفردات إتقان بين العلاقة"، *الدي محمد and خيرانس ريتسفا* *Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 3, no. 1 (2025): 1209–22.

⁸Retisfa Khairanis, Ahmad Kholil, and Wildana Wargadinata, "Political Dynamics of the Mughal Empire: An Integrated Historical Analysis," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1907–17.

⁹Retisfa Khairanis and Istiadah Istiadah, "The Impact of Post-Potivism and Constructivism on Public Policy: A Review of Philosophy of Science in Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 2101–8.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis dan menggali pemahaman tentang konsep kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an serta penerapannya dalam masyarakat multikultural kontemporer.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami dan menafsirkan konsep-konsep keagamaan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan dinamika sosial yang ada saat ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan tafsir, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pesan dari ayat-ayat yang relevan dengan konsep kepemimpinan khalifah.¹¹

Subjek penelitian ini terdiri dari teks-teks Al-Qur'an dan karya-karya tafsir serta literatur terkait lainnya yang membahas kepemimpinan, khalifah, dan keberagaman sosial. Selain itu, artikel-artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang membahas aplikasi konsep kepemimpinan khalifah dalam konteks sosial dan politik juga akan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Peneliti juga akan menganalisis pendapat para ulama dan cendekiawan Islam kontemporer yang menulis tentang penerapan ajaran Al-Qur'an dalam masyarakat multikultural.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yang mengacu pada pengumpulan, seleksi, dan analisis berbagai literatur yang relevan. Peneliti akan mengkaji secara mendalam tafsir-tafsir klasik dan modern, serta kajian-kajian kontemporer yang membahas topik kepemimpinan khalifah dalam konteks sosial. Analisis ini akan didukung dengan studi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, keadilan, dan musyawarah sebagai prinsip-prinsip utama kepemimpinan yang inklusif dan adil.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah literatur yang ada, mencatat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan, serta mengumpulkan berbagai pandangan para ilmuwan dan tafsir yang relevan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara menginterpretasi ayat-ayat tersebut secara kontekstual dan historis, serta menghubungkannya dengan isu-isu kontemporer terkait masyarakat multikultural. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan hubungan antara nilai-nilai kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an dan penerapannya dalam masyarakat yang beragam, serta untuk merumuskan rekomendasi dalam praktik kepemimpinan sosial.

LANDASAN TEORITIS

¹⁰Adelia Kusuma Sriandi and Bakhrudin All Habsy, "Library Research: Konseling Berbasis Acceptance and Commitment Therapy Sebagai Pencegahan Dan Intervensi Untuk Gangguan Kesehatan Mental," *Jurnal BK UNESA* 15, no. 1 (2025): 118–31.

¹¹Muhammad Aldi and Moh Toriquddin, "History of Thought Syuhudi Ismail: A Study of Textual and Contextual Analysis of Prophetic Hadiths," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1723–32.

Konsep kepemimpinan khalifah dalam Islam adalah inti dari penelitian ini. Dalam Al-Qur'an, manusia diberikan tugas sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30) untuk menjaga dan mengelola alam semesta, serta menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia.¹² Khalifah dalam pengertian ini lebih dari sekadar pemimpin politik; ia adalah individu yang memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Konsep kepemimpinan khalifah ini menekankan pentingnya integritas, keadilan, musyawarah, dan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin.

Selanjutnya, teori keadilan sosial sangat relevan dalam konteks kepemimpinan khalifah. Keadilan sosial berfokus pada pemerataan hak dan kesempatan bagi setiap individu dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Dalam Al-Qur'an, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan (QS. An-Nisa: 58). Teori keadilan sosial ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil, serta perlakuan yang setara terhadap semua individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, prinsip keadilan sosial ini sangat penting untuk meredakan ketegangan antar kelompok yang berbeda dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dizalimi.

Teori multikulturalisme juga merupakan landasan penting dalam penelitian ini. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui keberagaman budaya sebagai bagian integral dari masyarakat dan mendorong penghargaan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, multikulturalisme bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang inklusi aktif dan dialog antar kelompok. Konsep ini berhubungan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah yang mengajarkan pemimpin untuk menghargai keberagaman, menjaga persatuan dalam keragaman, dan menciptakan ruang untuk dialog serta kolaborasi. Pemimpin yang mengikuti prinsip ini harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Teori negosiasi sosial atau musyawarah adalah teori yang relevan untuk memahami bagaimana pemimpin yang berlandaskan pada prinsip khalifah dapat menjalankan tugasnya di masyarakat yang multikultural. Dalam Islam, musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang mengedepankan partisipasi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak (QS. Ali 'Imran: 159). Konsep musyawarah ini mengajarkan pemimpin untuk mendengarkan berbagai pendapat dan perspektif dari kelompok yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

Konsep toleransi juga sangat penting dalam membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Dalam konteks Islam, toleransi tidak hanya mencakup pengakuan terhadap perbedaan agama dan budaya, tetapi juga

¹²Dewi Fazira et al., "Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis Yang Berbasis Tauhid Dan Kepemimpinan Khalifah," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2025): 35–50.

pengertian terhadap hak-hak setiap individu untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Toleransi ini terkait erat dengan prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah yang mengutamakan kesetaraan, keadilan, dan rasa saling menghormati antar kelompok. Pemimpin yang mengadopsi nilai-nilai toleransi ini mampu memfasilitasi keharmonisan dalam masyarakat yang beragam dengan menghindari diskriminasi dan pengucilan terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda.¹³

Akhirnya, teori perubahan sosial juga perlu dipertimbangkan untuk memahami tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah di masyarakat multikultural. Perubahan sosial berkaitan dengan transformasi nilai, struktur, dan institusi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, tantangan besar adalah bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah, yang bersifat klasik dan ideal, dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan sosial dan politik yang ada dalam masyarakat kontemporer yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori perubahan sosial akan membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam realitas sosial yang terus berubah.

Dengan landasan teoritis ini, penelitian ini memiliki kerangka teoretis yang kokoh untuk menganalisis bagaimana konsep kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam masyarakat multikultural, serta memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kepemimpinan Khalifah dalam Al-Qur'an

Prinsip kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sangat mendalam dan berperan penting dalam kehidupan sosial, baik secara individu maupun kolektif. Konsep khalifah, yang pertama kali muncul dalam QS. Al-Baqarah: 30, menunjukkan bahwa manusia diangkat oleh Allah sebagai pengelola bumi. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap individu, terutama pemimpin, memiliki tanggung jawab besar terhadap sumber daya alam, sesama manusia, dan kehidupan secara keseluruhan. Pemimpin dalam perspektif khalifah bukanlah penguasa yang dominan, melainkan seseorang yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Berikut adalah tabel terkait prinsip kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan acuan dalam memahami karakteristik pemimpin yang ideal menurut ajaran Islam :

Tabel 1. Prinsip Kepemimpinan Khalifah dalam Al-Qur'an

¹³Ririn Indriyani and Deko Rio Putra, "Revitalisasi Nilai Toleransi Islam Dalam Sejarah Penyebaran Islam Di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo," *GHAITSA: Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2025): 180–93.

No	Prinsip Kepemimpinan Khalifah	Referensi dalam Al-Qur'an
1	Keadilan	QS. An-Nisa: 58
2	Tanggung Jawab Sosial	QS. Al-Baqarah: 30
3	Musyawaharah	QS. Ali 'Imran: 159
4	Pengelolaan Kekayaan Alam	QS. Al-Baqarah: 30
5	Kemakmuran Bersama	QS. Al-Mumtahanah: 8
6	Integritas Pemimpin	QS. Al-Mutaffifin: 1-3
7	Penghormatan terhadap Hak Individu	QS. Al-Baqarah: 177
8	Kejujuran dan Transparansi	QS. At-Taubah: 119
9	Kepedulian terhadap Minoritas	QS. Al-Baqarah: 177
10	Keharmonisan Sosial	QS. Al-Hujurat: 13

Kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga perlakuan terhadap sesama manusia. Konsep keadilan ini tidak hanya mengarah pada pembagian kekayaan secara merata, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. QS. An-Nisa: 58 menegaskan bahwa pemimpin harus bertindak dengan adil dan memberikan hak setiap orang sesuai dengan porsinya, tanpa adanya penindasan atau diskriminasi.

Selain itu, tanggung jawab sosial menjadi prinsip penting lainnya dalam kepemimpinan khalifah. Sebagai khalifah, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga terhadap kesejahteraan umat manusia dan kelangsungan hidup alam semesta. QS. Al-Baqarah: 30 menunjukkan bahwa manusia memiliki peran untuk menjaga dan mengelola bumi, yang mencakup keharusan untuk menjaga kelestarian alam dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Dalam konteks sosial, ini berarti pemimpin harus memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata dan tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan.

Musyawaharah atau konsultasi adalah salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan khalifah yang juga sangat relevan dalam masyarakat multikultural. QS. Ali 'Imran: 159 mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kepemimpinan, musyawarah berarti melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, baik itu dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam masyarakat yang beragam, prinsip musyawarah ini menjadi sarana penting untuk mencapai keputusan yang disepakati bersama, tanpa adanya dominasi dari satu kelompok atau individu.

Prinsip kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an juga sangat menekankan pada pengelolaan kekayaan alam secara bijaksana. Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam yang ada, termasuk tanah, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Namun, amanah ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran bahwa alam dan sumber daya tersebut bukan milik individu atau

kelompok tertentu, melainkan milik bersama yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama.

Terkait dengan kemakmuran bersama, prinsip kepemimpinan khalifah juga mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama. Dalam Al-Qur'an, pemimpin diharapkan untuk mengusahakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, tanpa ada yang tertinggal atau terpinggirkan. QS. Al-Mumtahanah: 8 menegaskan bahwa umat manusia yang beriman harus hidup dalam damai dan menjaga kesejahteraan sosial, bahkan dengan orang-orang yang berbeda agama atau budaya.

Integritas pemimpin juga menjadi aspek yang sangat penting dalam prinsip kepemimpinan khalifah. Seorang pemimpin yang mengemban tugas sebagai khalifah harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Dalam konteks ini, pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi masyarakatnya, baik dalam hal perilaku pribadi maupun dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada banyak orang. Al-Qur'an banyak mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh berlaku curang atau korup, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mutaffifin: 1-3.

Prinsip penghormatan terhadap hak individu juga menjadi salah satu dasar kepemimpinan khalifah. Dalam Al-Qur'an, setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, baik dalam aspek agama, budaya, maupun hak asasi manusia. Pemimpin harus memastikan bahwa hak-hak setiap individu dalam masyarakat dihargai dan dilindungi. Dalam konteks masyarakat multikultural, hal ini menjadi sangat penting, mengingat keberagaman agama dan budaya yang ada, sehingga prinsip ini harus diimplementasikan dengan bijak oleh pemimpin.

Pentingnya kejujuran dan transparansi dalam kepemimpinan juga tercermin dalam prinsip kepemimpinan khalifah. Pemimpin yang baik harus mampu menjaga keterbukaan informasi kepada publik dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kejujuran dan transparansi ini membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemimpin, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi kepemimpinan tersebut. Al-Qur'an mengajarkan bahwa pemimpin yang jujur akan memperoleh keberkahan dan dukungan dari umat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tawbah: 119.

Salah satu prinsip yang tak kalah penting adalah kepedulian terhadap minoritas. Dalam masyarakat yang multikultural, pemimpin yang baik harus memiliki rasa peduli terhadap kelompok minoritas, yang seringkali terpinggirkan atau tidak mendapatkan perhatian yang layak. QS. Al-Baqarah: 177 mengajarkan bahwa umat Islam harus menolong sesama, tanpa memandang perbedaan status sosial, etnis, atau agama. Dalam konteks kepemimpinan khalifah, ini berarti pemimpin harus memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas dilindungi dan mereka diberi kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sosial dan politik dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis. Pemimpin yang memegang teguh prinsip-prinsip khalifah tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam semesta. Dengan demikian, konsep kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat multikultural yang membutuhkan pemimpin yang adil, bijaksana, dan peduli terhadap setiap lapisan masyarakat.

Relevansi Konsep Khalifah untuk Masyarakat Multikultural

Konsep khalifah dalam Al-Qur'an, yang mengangkat manusia sebagai pengelola bumi, memberikan dasar filosofis yang sangat relevan bagi pembentukan masyarakat multikultural yang adil dan harmonis. Dalam konteks ini, konsep khalifah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan hubungan manusia antar sesama, baik yang seiman maupun yang berbeda agama dan budaya. Kepemimpinan yang berdasarkan pada prinsip khalifah mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan menjaga hubungan yang harmonis antar kelompok.¹⁴ Oleh karena itu, kepemimpinan khalifah dapat berfungsi sebagai landasan etis dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam masyarakat yang pluralistik.

Salah satu konsep utama dalam prinsip khalifah adalah keadilan yang menjadi nilai fundamental dalam menjaga keberagaman dalam masyarakat. Al-Qur'an menekankan bahwa pemimpin harus berlaku adil terhadap semua orang, baik dalam konteks pengelolaan sumber daya alam maupun perlakuan terhadap sesama. Prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat multikultural, di mana seringkali terdapat ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Pemimpin yang menegakkan keadilan akan menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk berkembang dan hidup dalam kedamaian.

Toleransi menjadi aspek kedua yang sangat penting dalam menerapkan konsep khalifah dalam masyarakat multikultural. Al-Qur'an menyatakan bahwa keberagaman dalam masyarakat adalah bagian dari takdir Tuhan, sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Hujurat: 13. Dalam ayat tersebut, Allah mengingatkan umat manusia bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk memisahkan diri, melainkan sebuah kesempatan untuk saling mengenal dan memperkaya pemahaman satu sama lain. Dalam masyarakat multikultural yang penuh dengan perbedaan budaya, agama, dan etnis, toleransi adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial. Pemimpin yang menerapkan prinsip toleransi akan membantu masyarakat untuk menghargai perbedaan dan membangun solidaritas antar kelompok yang berbeda.

Konsep musyawarah atau konsultasi, yang juga diajarkan dalam Al-Qur'an (QS. Ali 'Imran: 159), sangat relevan dalam masyarakat yang memiliki

¹⁴Eko Sumardianto Sumadi, "TELAAH HARTA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.

banyak keberagaman. Dalam masyarakat multikultural, pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada satu suara atau kelompok dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, musyawarah menjadi sarana penting bagi semua kelompok untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan atau keputusan yang akan diambil. Prinsip musyawarah mengajarkan bahwa keputusan yang diambil secara bersama-sama akan menciptakan rasa kepemilikan dan kesepakatan bersama, yang penting untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat yang heterogen.

Prinsip persatuan dalam Al-Qur'an juga sangat penting dalam masyarakat multikultural. Di tengah perbedaan, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umat manusia harus tetap bersatu dan saling mendukung satu sama lain. QS. Al-Hujurat: 10 menekankan bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan menghindari perpecahan. Dalam masyarakat multikultural, dimana perbedaan seringkali menjadi sumber konflik, prinsip persatuan mengajarkan untuk menemukan titik temu di antara perbedaan dan bekerja bersama demi kebaikan bersama. Hal ini penting untuk menciptakan solidaritas sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara kelompok-kelompok yang ada.

Kepemimpinan berdasarkan prinsip khalifah juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Sebagai khalifah di bumi, manusia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga atas kesejahteraan sesama makhluk. Dalam masyarakat multikultural, kesejahteraan sosial mencakup aspek pemerataan hak dan akses terhadap sumber daya yang ada. Pemimpin yang mengemban tugas sebagai khalifah harus memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dijaga, dengan cara memberikan peluang yang setara bagi setiap individu dan kelompok, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau agama. Kesejahteraan sosial yang merata akan menciptakan rasa keadilan yang menyeluruh, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi konflik dalam masyarakat multikultural.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bijaksana juga menjadi bagian dari relevansi konsep khalifah untuk masyarakat multikultural. Sebagai khalifah, pemimpin diharapkan untuk menjaga bumi dan segala isinya agar dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam masyarakat yang memiliki beragam kelompok dengan kebutuhan yang berbeda-beda, pengelolaan sumber daya alam yang adil sangat penting untuk menciptakan kesetaraan. Pemimpin yang menerapkan prinsip khalifah harus memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi.

Penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam kepemimpinan khalifah juga relevan dalam masyarakat multikultural. Pemimpin yang jujur dan transparan dalam kebijakan dan tindakannya akan membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting dalam masyarakat yang beragam, di mana seringkali terdapat perasaan kecurigaan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, prinsip kejujuran dan transparansi menjadi cara

Konsep Kepemimpinan Khalifah dalam Al-Qur'an untuk Masyarakat Multikultural Kontemporer untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih kuat antar kelompok, dengan menciptakan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Di sisi lain, pendidikan antarbudaya dan pengembangan dialog yang terbuka antara kelompok-kelompok yang berbeda juga merupakan bagian penting dalam relevansi konsep khalifah. Al-Qur'an mengajarkan bahwa perbedaan adalah peluang untuk saling mengenal, dan ini menciptakan landasan untuk dialog yang konstruktif. Dalam masyarakat multikultural, pendidikan antarbudaya sangat penting untuk meningkatkan pemahaman antar kelompok, mengurangi stereotip, dan membangun rasa saling menghormati. Pemimpin yang mengadopsi prinsip khalifah harus memfasilitasi dialog antarbudaya ini untuk memastikan bahwa setiap kelompok merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial.

Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah dalam masyarakat multikultural memberikan peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk hidup dengan damai. Dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, toleransi, musyawarah, persatuan, kesejahteraan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan, prinsip-prinsip ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun hubungan antar kelompok yang lebih kuat. Dalam hal ini, pemimpin yang mengimplementasikan prinsip khalifah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sumber daya, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya masyarakat multikultural yang lebih baik, lebih adil, dan lebih damai.

Dengan fokus pada relevansi konsep khalifah untuk masyarakat multikultural, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an sangat mendukung terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan bekerja sama dalam keberagaman. Pemimpin yang memegang teguh prinsip khalifah akan mampu menjadikan masyarakat multikultural sebagai kekuatan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan keharmonisan antar kelompok yang berbeda.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Nilai-Nilai Khalifah

Implementasi nilai-nilai kepemimpinan khalifah dalam masyarakat multikultural menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Dalam banyak konteks, struktur kekuasaan yang sudah mapan cenderung menahan laju perubahan, terutama jika perubahan tersebut mengancam kekuasaan atau posisi tertentu. Pemimpin yang ingin mengimplementasikan prinsip-prinsip khalifah sering kali menghadapi hambatan dari kelompok yang merasa terancam oleh prinsip keadilan sosial dan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Oleh karena itu, resistensi ini dapat menghalangi upaya untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan adil di masyarakat yang beragam.¹⁵

Selain itu, tantangan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai Islam yang moderat. Beberapa

¹⁵Lukman Trijaya Abadi, "Implementasi Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju Dalam Kehidupan Keluarga Muhammadiyah Kota Surakarta," *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 1 (2025): 28–44.

kelompok mungkin hanya memiliki pemahaman yang sempit tentang konsep khalifah dan menginterpretasikannya dengan cara yang tidak inklusif atau bahkan eksklusif. Pemahaman yang salah ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan antar kelompok, menghambat proses pembangunan masyarakat yang lebih harmonis. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya ekstremisme yang terkadang menyalahgunakan prinsip-prinsip agama untuk membenarkan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok lain.

Perbedaan interpretasi terhadap ajaran Al-Qur'an juga dapat menjadi tantangan dalam implementasi prinsip khalifah. Al-Qur'an sering kali dipahami dan diterjemahkan secara berbeda-beda tergantung pada mazhab, aliran, atau perspektif yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok. Ketidakselarasan dalam interpretasi ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik tentang bagaimana seharusnya prinsip-prinsip khalifah diterapkan dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi ini dapat memicu ketegangan antar kelompok yang berpegang pada pemahaman yang berbeda.

Kurangnya pemahaman tentang pluralisme dan toleransi antaragama juga menjadi tantangan besar dalam menerapkan nilai-nilai khalifah di masyarakat multikultural. Dalam banyak masyarakat, keberagaman agama dan budaya tidak selalu diterima dengan baik, dan kelompok mayoritas sering kali menganggap dirinya sebagai pihak yang lebih dominan atau lebih sah dalam menentukan norma sosial. Hal ini bisa menyebabkan marginalisasi kelompok-kelompok minoritas yang berbeda agama atau budaya. Untuk mengatasi hal ini, pemimpin perlu memperkenalkan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi yang tercermin dalam prinsip khalifah sebagai cara untuk merangkul keberagaman, daripada melihatnya sebagai ancaman.

Tantangan lainnya yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai khalifah adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya dalam menjalankan kebijakan yang inklusif dan adil. Banyak negara atau masyarakat yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk menyediakan layanan dasar yang merata kepada seluruh kelompok, terutama yang berada di wilayah marginal. Dalam konteks ini, pemimpin yang menerapkan prinsip khalifah harus mampu mengelola sumber daya yang ada dengan bijak, memprioritaskan kebutuhan kelompok yang paling membutuhkan, serta memastikan distribusi yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Ini sering kali membutuhkan upaya yang lebih besar untuk membangun kesadaran dan komitmen kolektif terhadap keadilan sosial.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi salah satu tantangan signifikan dalam implementasi nilai-nilai khalifah. Dalam banyak masyarakat, ketidakpercayaan terhadap pemimpin dan pemerintah dapat menjadi penghalang besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai khalifah. Ketidakpercayaan ini sering kali disebabkan oleh praktik korupsi, ketidaktransparanan, dan ketidakadilan yang terjadi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini,

Konsep Kepemimpinan Khalifah dalam Al-Qur'an untuk Masyarakat Multikultural Kontemporer
pemimpin harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara.

Polaritas sosial yang tinggi dalam masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan prinsip khalifah. Dalam masyarakat yang terbelah secara sosial atau politik, di mana terdapat kelompok-kelompok yang saling berlawanan, sangat sulit untuk mencapai kesepakatan bersama tentang prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman. Pemimpin yang ingin menerapkan nilai-nilai khalifah harus mampu menjembatani perbedaan ini, menciptakan ruang dialog yang konstruktif, dan menyatukan masyarakat di sekitar tujuan bersama yang mengutamakan kesejahteraan kolektif. Hal ini memerlukan kepemimpinan yang bijaksana dan kemampuan untuk mengelola konflik secara efektif.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai khalifah secara efektif. Salah satu solusi utama adalah pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai toleransi, keadilan, dan inklusivitas yang terkandung dalam konsep khalifah. Pemimpin harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan pemahaman yang benar tentang bagaimana konsep khalifah dapat diterapkan dalam masyarakat yang multikultural. Pendidikan ini harus menekankan pentingnya menghargai perbedaan, berempati terhadap orang lain, dan berkomitmen pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Dialog antaragama dan antarbudaya juga merupakan solusi penting untuk mengatasi tantangan dalam implementasi prinsip khalifah. Pemimpin harus mendorong terjadinya dialog terbuka antar kelompok agama dan budaya yang berbeda, agar masing-masing kelompok dapat saling memahami dan menghormati perbedaan yang ada. Melalui dialog ini, konflik-konflik yang mungkin timbul dapat dikelola dengan cara yang lebih damai dan konstruktif. Dalam hal ini, prinsip musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam membangun kesepakatan dan solusi yang diterima oleh semua pihak.

Pelatihan bagi pemimpin dan pengambil kebijakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip khalifah secara efektif juga sangat penting. Pemimpin harus diberikan pelatihan yang memadai tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan yang adil, transparan, dan inklusif. Hal ini termasuk pemahaman tentang keberagaman budaya, pengelolaan sumber daya secara adil, serta keterampilan dalam menyelesaikan konflik. Dengan pelatihan ini, pemimpin akan lebih siap untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memastikan implementasi yang lebih efektif, peningkatan kapasitas pemerintahan dan penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan

transparansi. Selain itu, sistem hukum harus mendukung perlindungan hak-hak individu dan kelompok minoritas agar mereka tidak terpinggirkan. Penegakan hukum yang adil akan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang diuntungkan atau dirugikan hanya karena perbedaan latar belakang mereka.

Dalam konteks negara-negara yang memiliki pluralitas agama dan budaya, solusi lain yang dapat diterapkan adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Pemimpin harus menekankan bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dihargai dan dilestarikan. Dengan memperkuat nilai kebangsaan yang inklusif, pemimpin dapat menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat di antara seluruh kelompok masyarakat, sehingga mereka dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.¹⁶

Akhirnya, penerapan nilai-nilai khalifah dalam masyarakat multikultural juga memerlukan pengawasan masyarakat yang aktif. Masyarakat harus diberdayakan untuk memantau dan mengkritisi kebijakan yang ada, agar nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial benar-benar diterapkan dengan baik. Pengawasan ini juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Dengan memahami tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, pemimpin dapat mengimplementasikan nilai-nilai khalifah dalam masyarakat multikultural dengan lebih efektif. Implementasi ini, meskipun tidak mudah, akan membuahkan hasil yang positif bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis, yang mampu menghargai keberagaman dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi semua.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan khalifah dalam Al-Qur'an, yang mencakup keadilan, musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab, memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan dalam masyarakat multikultural kontemporer. Meskipun konsep ini memiliki potensi besar untuk membangun harmoni sosial, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, perbedaan interpretasi, dan ketidaksetaraan sosial harus dihadapi dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak konkret implementasi prinsip khalifah dalam kebijakan publik dan program sosial di negara multikultural, serta menggali pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penelitian lebih lanjut juga dapat memfokuskan pada peran pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk menginternalisasi nilai-nilai khalifah di kalangan generasi muda guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

¹⁶Haryuni Hariati and Evi Rahayu, *Ilmu Pendidikan Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Lukman Trijaya. "Implementasi Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju Dalam Kehidupan Keluarga Muhammadiyah Kota Surakarta." *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 1 (2025): 28–44.
- Aldi, Muhammad, Fatimah Azzahra, Muhammad Aminullah, and Samsul Susilawati. "Optimizing the Learning Process through Theory-Based Media Selection: Constructivist, Cognitive, Collaborative, and Motivational Perspectives." *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology* 6, no. 1 (2025).
- Aldi, Muhammad, and Ahmad Barizi. "Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Budaya Alam Minangkabau: Membangun Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pengetahuan." *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e-ISSN 2721-9666* 6, no. 1 (2025): 212–21.
- Aldi, Muhammad, and Akhmad Nurul Kawakib. "Reconstruction of Islamic Education Philosophy in Minangkabau Customary Values: Actualizing the Principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2025): 1548–57.
- Aldi, Muhammad, and Retisfa Khairanis. "The Synergy of Religion and Malay Culture in Improving the Empowerment of Islamic Communities Towards Achieving SDGS." *PERADA* 7, no. 2 (2024).
- Aldi, Muhammad, and Moh Toriquuddin. "History of Thought Syuhudi Ismail: A Study of Textual and Contextual Analysis of Prophetic Hadiths." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1723–32.
- Ansory, Isnain, and Muhammad Yusuf Siddik. "MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM STUDI ULUM AL-QUR'AN DAN ILMU USHUL FIQIH." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 1–19.
- Fazira, Dewi, Abdul Malik Karim Amrullah, Yogi Pandapotan Siregar, and Ahmad Wahyudi Zein. "Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis Yang Berbasis Tauhid Dan Kepemimpinan Khalifah." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2025): 35–50.
- — —. "Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis Yang Berbasis Tauhid Dan Kepemimpinan Khalifah." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2025): 35–50.
- Hariati, Haryuni, and Evi Rahayu. *Ilmu Pendidikan Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Indriyani, Ririn, and Deko Rio Putra. "Revitalisasi Nilai Toleransi Islam Dalam Sejarah Penyebaran Islam Di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo." *GHAITSA: Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2025): 180–93.
- Khairanis, Retisfa, and Istiadah Istiadah. "The Impact of Post-Potivism and Constructivism on Public Policy: A Review of Philosophy of Science in Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 2101–8.
- Khairanis, Retisfa, Ahmad Kholil, and Wildana Wargadinata. "Political Dynamics of the Mughal Empire: An Integrated Historical Analysis." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1907–17.

- Sriandi, Adelia Kusuma, and Bakhrudin All Habsy. "Library Research: Konseling Berbasis Acceptance and Commitment Therapy Sebagai Pencegahan Dan Intervensi Untuk Gangguan Kesehatan Mental." *Jurnal BK UNESA* 15, no. 1 (2025): 118–31.
- Sumadi, Eko Sumardianto. "TELAAH HARTA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.
- ريتسفا خيرانس and ألدّي محمد. "بايور الإسلامية التربية معهد في القراءة وفهم المفردات إتقان بين العلاقة." *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 3, no. 1 (2025): 1209–22.